



PIDATO

PIMPINAN DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT DENGAN ACARA RAPAT PARIPURNA DALAM RANGKA:

- 1. Penyampaian Tanggapan Gubernur Sumatera Barat terhadap Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;**
- 2. Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Jalan Provinsi.**

Senin, 11 Mei 2026

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR GUBERNUR SUMATERA BARAT

**YTH. SDR PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD
PROVINSI SUMATERA BARAT**

YTH. SDR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH

**YTH. SDR SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN,
PIMPINAN OPD DILINGKUP PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**YTH. SDR PIMPINAN PT. BANK NAGARI, BUMN DAN BUMD
REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG
BERBAHAGIA**

Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'alla, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan

untuk dapat hadir kembali pada Rapat Paripurna DPRD dengan agenda **“Pertama, Penyampaian Tanggapan Gubernur Sumatera Barat terhadap Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; dan**

Kedua, Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Jalan Provinsi”.

Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Besar Muhammad SAW, **Allahumma shalli ‘ala Sayyidina Muhammad wa ‘ala aali Sayyidina Muhammad**

Ucapan terima kasih, dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Saudara Gubernur Sumatera Barat, beserta seluruh hadirin yang telah hadir dalam Rapat Paripurna kita pada pagi hari ini.

Dengan mengucapkan **”Bismillahirrahmanirrahim”** Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan acara **“Penyampaian Tanggapan Gubernur Sumatera**

Barat terhadap Ranperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani; serta Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Jalan Provinsi'', kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c Peraturan Dewan 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Tertib, dinyatakan bahwa Rapat Paripurna selain menetapkan Peraturan Daerah dan APBD, dihadiri sekurang-kurangnya setengah dari jumlah Anggota DPRD.

.....

Pimpinan Rapat Membacakan Daftar Hadir Anggota

.....

Memperhatikan kehadiran Anggota DPRD telah memenuhi kourum, maka Rapat Paripurna telah dapat kita laksanakan.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami hormati;

Sebelum kita memasuki agenda pokok pada Rapat Paripurna ini, Pada kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Pemerintah Daerah atas capaian pertumbuhan ekonomi daerah pada triwulan I tahun 2026 sebesar 5,02% berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Capaian tersebut merupakan indikator penting yang menunjukkan bahwa roda pembangunan daerah bergerak secara positif di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian dan proses pemulihan pascabencana yang masih berlangsung pada saat ini.

Pertumbuhan ekonomi ini tentu tidak hadir dengan sendirinya, melainkan melalui kerja keras, konsistensi kebijakan, penguatan tata kelola pemerintahan, serta sinergi antara pemerintah daerah, DPRD, dunia usaha, dan seluruh elemen masyarakat.

Kami memandang bahwa capaian ini menjadi modal strategis untuk memperkuat daya saing daerah,

meningkatkan investasi, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Namun demikian, kami juga mengingatkan agar keberhasilan pertumbuhan ekonomi ini dapat diiringi dengan pemerataan pembangunan, pengendalian inflasi daerah, penguatan sektor UMKM, serta perhatian yang lebih besar terhadap masyarakat kecil agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan secara adil dan merata.

Oleh karena itu, kami berharap Pemerintah Daerah dapat mempertahankan bahkan meningkatkan capaian positif ini dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas, efektivitas program, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami hormati;

Di sinilah letak relevansi dan urgensi dari tiga Rancangan Peraturan Daerah yang sedang kita bahas

bersama, yaitu: Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, serta Ranperda tentang Penyelenggaraan Jalan Provinsi.

Ketiganya bukanlah produk hukum yang berdiri sendiri-sendiri. Ketiganya saling terhubung dan saling menopang dalam satu visi besar: mewujudkan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat yang tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan.

Pendidikan adalah investasi jangka panjang kita untuk menyiapkan generasi Sumatera Barat yang cerdas, terampil, dan berkarakter, generasi yang akan mewarisi dan memimpin kemajuan daerah ini di masa yang akan datang. Perlindungan dan Pemberdayaan Petani adalah komitmen moral kita kepada mayoritas rakyat yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian daerah, namun belum sepenuhnya menikmati buah dari pertumbuhan yang ada. Sementara Penyelenggaraan Jalan Provinsi adalah keniscayaan infrastruktur, karena tanpa

jalan yang baik, hasil bumi tidak akan sampai ke pasar, investor tidak akan melirik potensi daerah, dan roda ekonomi tidak akan berputar dengan optimal.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami hormati;

Sesuai dengan agenda pokok yang pertama Pada Rapat Paripurna, tanggal 6 Mei 2026 yang lalu, Komisi V dan Komisi II DPRD Sumatera Barat telah menyampaikan secara resmi Nota Penjelasan Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Nota Penjelasan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Dalam pengantar yang disampaikan oleh Ketua Komisi V, Perubahan Ranperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan, merupakan kebutuhan nyata untuk menyesuaikan regulasi pendidikan daerah kita, sesuai dengan dinamika kebijakan nasional, perubahan kurikulum, perkembangan teknologi pembelajaran, serta tuntutan pemerataan akses dan mutu pendidikan

menengah dan pendidikan khusus yang menjadi kewenangan provinsi..

Sementara itu, Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang disampaikan oleh Komisi II adalah wujud nyata keberpihakan DPRD kepada para petani Sumatera Barat. Sebagaimana kita ketahui bersama, sektor pertanian masih menjadi salah satu penopang utama perekonomian daerah dan menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat signifikan. Namun ironisnya, kesejahteraan petani kita masih jauh dari kata ideal. Fluktuasi harga, sulitnya akses terhadap pembiayaan, ancaman alih fungsi lahan, perubahan iklim, hingga keterbatasan teknologi pascapanen, adalah persoalan-persoalan klasik yang masih membelenggu petani kita hingga hari ini.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami hormati;

Sesuai dengan tahapan pembahasan Peraturan Daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 dan Tata Tertib DPRD, setelah

pengusul menyampaikan Nota Penjelasan Ranperda maka Gubernur memberikan tanggapan terhadap Ranperda tersebut.

Sehubungan dengan hal tersebut, tentu sdr. Gubernur, telah menyiapkan tanggapan Untuk itu, kepada Sdr. Gubernur kami Persilahkan

.....
Pembacaan Tanggapan Gubernur Sumbar
.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Gubernur yang telah menyampaikan Tanggapannya.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami hormati;

Kita sama-sama telah mendengar dengan seksama Tanggapan Sdr. Gubernur terhadap Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Dalam Tanggapan tersebut, cukup

banyak pertanyaan, masukan, pandangan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah yang perlu dijelaskan atau ditanggapi oleh DPRD.

Sesuai dengan tahapan pembahasan, jawaban dan/atau tanggapan DPRD terhadap Tanggapan Gubernur tersebut, akan disampaikan pada Rapat Paripurna Rabu tanggal 13 Mei 2026. Berkenaan dengan hal tersebut, kami meminta kepada Komisi V dan II untuk dapat pula menyiapkan jawaban dan/atau tanggapan yang komprehensif dan menyeluruh terkait dengan pertanyaan, tanggapan dan permintaan penjelasan yang disampaikan oleh Sdr. Gubenur tersebut.

Sdr. Gubernur dan Rapat Paripurna yang kami hormati;

Dengan telah disampaikannya tanggapan Gubernur terhadap Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, dan Ranperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, maka kita masuk kepada acara kedua yakni Penyampaian

Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Jalan Provinsi.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Ranperda tentang Penyelenggaraan Jalan Provinsi memiliki nilai strategis yang sangat tinggi. Jalan adalah urat nadi perekonomian, jalan adalah penghubung antarwilayah, dan jalan adalah penanda kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat. Kondisi jaringan jalan provinsi yang baik, terintegrasi, dan berkelanjutan akan menjadi prasyarat utama bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif sebagaimana telah kami sampaikan di awal pidato ini. Oleh karena itu, Pandangan Umum Fraksi yang akan disampaikan pada hari ini diharapkan dapat menjadi masukan yang konstruktif, kritis, dan komprehensif bagi penyempurnaan Ranperda ini.

selanjutnya kita berikan kesempatan kepada masing-masing Fraksi untuk menyampaikan Pandangan

Umum Fraksinya terhadap Ranperda tentang Penyelenggaraan Jalan Provinsi.

Untuk itu, kepada Yth. Ketua atau Juru Bicara Fraksi kami persilahkan.

- 1. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Partai PKS
.....
- 2. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Gerindra
.....
- 3. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Partai Golkar
.....
- 4. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Nasdem
.....
- 5. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Partai PAN
.....
- 6. Ketua atau Juru Bicara Fraksi Demokrat
.....
- 7. Ketua atau Juru Bicara Fraksi PPP
.....
- 8. Ketua atau Juru Bicara Fraksi PDI-P & PKB

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua atau Juru Bicara Fraksi-Fraksi yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya terhadap Ranperda Penyelenggaraan Jalan Provinsi.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Kita sama-sama telah mendengar dengan seksama Pandangan Umum yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi terhadap Ranperda Penyelenggaraan Jalan Provinsi. Dalam Pandangan Umum Fraksi tersebut, cukup banyak pertanyaan, masukan, pandangan yang disampaikan oleh masing-masing Fraksi yang perlu dijelaskan atau ditanggapi oleh Pemerintah Daerah.

Sesuai dengan tahapan pembahasan, jawaban dan/atau tanggapan Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi tersebut, akan disampaikan pada Rapat Paripurna Rabu tanggal 13 Mei 2026. Berkenaan dengan hal tersebut, kami meminta kepada Pemerintah Daerah untuk dapat pula menyiapkan jawaban dan/atau

tanggapan yang komprehensif dan menyeluruh terkait dengan pertanyaan, tanggapan dan permintaan penjelasan yang disampaikan oleh Fraksi-Fraksi tersebut.

Rapat Paripurna Yang Kami Hormati;

Dengan telah selesainya seluruh rangkaian Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat, maka berakhir pulalah Rapat Paripurna kita pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna ini kami tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf, apabila dalam pelaksanaan Rapat Paripurna ini terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua. Akhirnya dengan mengucapkan “***Alhamdulillahirabbilalamin***”, Rapat Paripurna Dewan pada hari ini, secara resmi kami tutup.
..... (Ketukan Palu 3 Kali).

Terima kasih

Billahitaufiq walhidayah

Wassalam’ualikum wr.wb